

**INVENTARISASI DAN ANALISIS HAMBATAN
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KELAPA SAWIT SWADAYA
DI KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA**

**INVENTORY AND ANALYSIS OF INCREASING PRODUCTIVITY
OBSTACLES OF INDEPENDENT OIL PALM PLANTATIONS IN KUBU
DISTRICT OF KUBU RAYA REGENCY**

Henny Sulistyowati^{1,2)}, Nur Arifin²⁾

²⁾Budidaya Tanaman Perkebunan, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura

ABSTRACT

Independent oil palm plantations in Indonesia are facing problems of low productivity that have not been solved by government policy and inventoried by related government institutions. First step that needs to be done is by establishing database of obstacles faced by farmers. The purposes of this research are to make inventory of and analyze the obstacles prohibiting increased productivity of independent oil palm plantations in Kubu District of Kubu Raya Regency. Data are collected through interview and questionnaires and analyzed descriptively. The result shows that the independent oil palm plantations are still facing the problem of low FFB yield per hectare. The obstacles are: limited access to information and technology of good agricultural practices; inaccessible information of updated FFB price and direct market to manufacturers; limited capital and no other fundings aside personal incomes; and absent of related institutional support. Recommendations to be considered by government and related stakeholders in developing policy to uphold the farmers abilities in plantation management to increase their productivity are as follows: provide access to informations, guidance, and assistance in implementing good agricultural practices; develop efficient FFB yield marketing channels; provide sustainable funding schemes for the farmers; and intensify the related institutions supporting role to facilitate the farmers in developing their farmings.

Keywords: Productivity obstacles, independent oil palm plantations

INTISARI

Perkebunan kelapa sawit swadaya dihadapkan pada permasalahan rendahnya produktivitas, dan juga belum tersentuh oleh kebijakan pemerintah, bahkan belum terdata di instansi pemerintah terkait. Langkah awal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit swadaya adalah membuat basis data tentang hambatan yang dialami oleh petani. Tujuan dari penelitian ini adalah menginventarisasi dan menganalisis hambatan peningkatan produktivitas kelapa sawit swadaya di Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan kuesioner, dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usahatani kelapa sawit swadaya di Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya masih dihadapkan pada rendahnya hasil TBS per satuan luas. Hambatan yang dihadapi oleh petani yaitu: keterbatasan petani dalam mendapatkan informasi dan teknologi tentang budidaya yang baik dan benar; petani tidak mengetahui informasi tentang harga TBS dan tidak mendapatkan akses untuk menjual TBS langsung ke pabrik; keterbatasan modal dan tidak memiliki akses terhadap sumber pembiayaan lain selain pendapatannya; peran kelembagaan yang belum dirasakan oleh petani. Rekomendasi yang bisa dijadikan pertimbangan oleh pemerintah maupun pihak terkait lainnya dalam membuat kebijakan agar petani mampu meningkatkan produktivitas dan mengelola kebunnya adalah: pemerintah dan pihak terkait lainnya memberikan informasi tentang teknologi budidaya kelapa sawit, bimbingan, dan pendampingan pada petani; menciptakan rantai pemasaran hasil yang efisien; pemerintah atau lembaga lainnya perlu menciptakan suatu skema penyediaan modal bagi petani secara berkelanjutan; peningkatan peran kelembagaan yang dapat memayungi dan memfasilitasi petani dalam mengembangkan usahatannya.

Kata kunci: hambatan produktivitas, kelapa sawit swadaya.

¹Alamat penulis untuk korespondensi: Henny Sulistyowati, Email: henny.sulistyowati@faperta.untan.ac.id

PENDAHULUAN

Perkebunan kelapa sawit swadaya adalah kebun kelapa sawit rakyat yang tidak berafiliasi dengan lembaga manapun. Petani mengusahakan kebunnya secara mandiri, mulai dari pembukaan lahan sampai menjual hasilnya berupa tandan buah segar (TBS) ke pabrik lokal, baik secara langsung atau melalui pedagang perantara (PASPI, 2017). Hasil penelitian di Jambi oleh Mara dan Fitri (2013), perkebunan kelapa sawit swadaya telah mampu meningkatkan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) desa sebesar 1,4 kali dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sampai 11%. Perkebunan kelapa sawit rakyat juga berperan dalam meningkatkan aksesibilitas daerah-daerah tertentu dan mengurangi jumlah tanah-tanah yang sebelumnya tidak terkelola dengan baik (Jelsma *et al.*, 2017).

Perkebunan kelapa sawit swadaya di Kabupaten Kubu Raya dihadapkan pada permasalahan produktivitas TBS yang rendah. Hasil penelitian terdahulu (Sulistyowati, dkk., 2021) menyatakan bahwa lebih dari 50% kebun kelapa sawit swadaya di Kabupaten Kubu Raya produktivitasnya hanya berkisar 10 ton/ha/tahun, tergolong rendah jika dibandingkan dengan produktivitas secara nasional sebesar \pm 20 ton/ha/tahun (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2019). Hal ini menunjukkan masih banyak hambatan yang dialami oleh petani kelapa sawit swadaya dalam menjalankan usahatannya.

Perkebunan kelapa sawit swadaya juga tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah, bahkan belum terdata di instansi pemerintah terkait. Tanpa dukungan pemerintah atau perusahaan

besar, perkebunan kelapa sawit swadaya akan menghadapi permasalahan yang lebih serius seiring makin kuatnya tekanan dari pihak pembeli yang mensyaratkan banyak hal seperti standar *roundtable sustainable palm oil* (RSPO).

Langkah awal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit swadaya di Kabupaten Kubu Raya adalah membuat basis data tentang hambatan yang dialami oleh petani. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penelitian tentang inventarisasi dan analisis hambatan peningkatan produktivitas kelapa sawit swadaya, yang hasilnya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan, tindakan, dan aturan oleh pemerintah dan instansi terkait, yang tujuannya untuk mengatasi hambatan peningkatan produktivitas kelapa sawit swadaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Kecamatan Kubu dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki perkebunan kelapa sawit paling luas dibandingkan kecamatan lainnya. Pengumpulan data dilakukan pada bulan November 2020, menggunakan metode wawancara secara terstruktur, dengan membuat pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kuesioner. Data primer berisi tentang hambatan yang dialami oleh petani kelapa sawit swadaya dalam meningkatkan produksinya ditinjau dari aspek teknologi, ketersediaan modal atau biaya, kemampuan mengakses pasar, peran kelembagaan dan motivasi petani, juga berisi tentang karakteristik petani yang terdiri dari umur, tingkat pendidikan, mata pencarian, dan jumlah anggota keluarga. Data penunjang

atau data skunder diperoleh dari instansi terkait dan kepustakaan. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kubu dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan baik luas maupun produksi, walaupun masih terdapat berbagai kendala yang menimbulkan konflik, terutama masalah lingkungan dan sosial. Sampai saat ini, terdapat 5 perusahaan besar swasta perkebunan kelapa sawit yang memiliki izin dan telah beroperasi di Kecamatan Kubu, terdiri dari 4 perusahaan penanaman modal dalam negeri dan 1 perusahaan modal asing (BPS Kubu Raya, 2020).

Keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kubu menjadi pencetus munculnya petani kelapa sawit swadaya di kecamatan ini. Sebagian besar masyarakat yang ikut bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit merasakan kesejahteraannya meningkat. Penduduk yang berada di sekitar perkebunan juga ikut merasakan hasil dari kelapa sawit dengan adanya sistem bagi hasil dari perusahaan. Selain itu, hak bagi hasil juga diberikan kepada warga yang menyerahkan lahan bersertifikat mereka kepada perusahaan untuk dibangun kebun kelapa sawit. Potensi hasil yang lebih menjanjikan ini menyebabkan petani tertarik untuk mengusahakan tanaman kelapa sawit.

Karakteristik Petani

Data umur responen diperlukan untuk menganalisis kemampuan petani dalam menjalankan kegiatan usahatannya. Menurut Darwis (2017), umur produktif berada di antara 17 - 55 tahun. Sebagian besar petani responden termasuk kategori usia produktif, berada pada kisaran umur 31 sampai 55 tahun, yaitu sebesar 63,34%. Hal ini menunjukkan bahwa petani responden ditinjau dari segi umur cukup mampu untuk melaksanakan dan mengelola usahatannya. Kondisi fisik seseorang yang berada pada usia produktif umumnya mampu untuk melakukan pekerjaan pekerjaan yang erat kaitannya dengan kekuatan fisik, selain itu kemampuan berpikir juga lebih baik sehingga diharapkan dapat mengelola usahatannya dengan optimal.

Tingkat pendidikan petani responden cukup bervariasi, persentase terbanyak adalah petani yang berpendidikan SD sebanyak 56,67%, diikuti petani yang berpendidikan SMP sebesar 26,27%, dan SMA sebesar 16,66%. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi kemampuan petani dalam menyerap informasi dan teknologi, petani dengan latar belakang pendidikan rendah tentu akan sulit memahami apa saja yang harus dilakukan agar hasil usahatannya meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara, selain menjadi petani kelapa sawit swadaya, semua responden memiliki pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata pencaharian petani responden bervariasi, ada yang berprofesi sebagai buruh di perusahaan perkebunan, berjualan, dan bertanam sayur-sayuran.

Ditinjau dari segi pendapatan, ternyata pendapatan dari usahatani kelapa sawit tergolong kecil, masih ada petani yang penghasilannya di bawah Rp 500.000 per bulannya yaitu sebesar 30,00%, dan penghasilan tertinggi hanya di kisaran Rp 1.000.000 sampai Rp 2.000.000, itu pun hanya 6,67% dari petani responden. Hal ini yang menyebabkan petani swadaya kelapa sawit memiliki pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dan bahkan terkesan kegiatan usahatani kelapa sawit hanya sebagai pekerjaan sampingan atau bukan menjadi pekerjaan utama.

Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan selain sebagai petani swadaya kelapa sawit terlihat lebih besar dibandingkan pendapatan dari usahatani kelapa sawit. Sebanyak 16,67 % petani responden berpenghasilan di atas Rp 2.000.000 per bulan, yaitu mereka yang bekerja sebagai buruh di perusahaan perkebunan, sedangkan yang berpenghasilan di bawah Rp 1.000.000 sebanyak 60% yaitu mereka yang mendapatkan penghasilan dari usahatani sayur-sayuran dan berjualan. Kesibukan bekerja di bidang lain menyebabkan perhatian dan waktu untuk mengelola usahatani kelapa sawit agak terabaikan.

Sebagian besar petani responden memiliki tanggungan keluarga sebanyak 3 - 4 orang yaitu sebesar 63,33%, dan sebagian lainnya memiliki tanggungan keluarga sebanyak 1 - 2 orang yaitu sebesar 36,67%. Jumlah tanggungan keluarga biasanya menjadi motivasi bagi petani dalam menjalankan usahatannya. Semakin banyak jumlah tanggungan dalam keluarga maka akan semakin giat petani mengelola usahatannya dengan tujuan untuk meningkatkan hasil, yang berimplikasi pada peningkatan

pendapatan petani. Banyaknya jumlah tanggungan, terutama tanggungan usia produktif, juga dapat menghemat biaya tenaga kerja karena tenaga kerja dalam keluarga tidak memerlukan upah (Soekartawi, 2016).

Hambatan Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit Swadaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hambatan yang dialami oleh petani swadaya dalam peningkatan produktivitas usahatannya. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah maupun semua pihak yang terkait dengan keberadaan petani kelapa sawit swadaya, agar dapat berperan mewujudkan keinginan petani untuk meningkatkan hasil usahatannya, dan mampu menghadapi tantangan pembeli yang mensyaratkan banyak hal termasuk standar ISPO dan RSPO.

Hambatan informasi dan teknologi

Produktivitas kelapa sawit swadaya di Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya masih dihadapkan pada rendahnya hasil TBS per satuan luas, hanya berkisar 6 – 15 ton/ha/tahun dibandingkan dengan produktivitas kelapa sawit di tingkat nasional pada tahun 2018 yang berada pada kisaran 20 – 21 ton/ha/tahun (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2019). Hal ini terjadi karena keterbatasan petani dalam mendapatkan informasi dan teknologi tentang budidaya yang baik dan benar. Transfer teknologi dan informasi dari perusahaan perkebunan yang berada di sekitar lahan petani swadaya, maupun dari pemerintah atau instansi terkait belum berjalan sebagaimana mestinya, oleh karena itu kualitas dan kuantitas hasil dari kebun kelapa sawit swadaya masih rendah jika dibandingkan dengan hasil dari

perusahaan perkebunan. Kurangnya bahkan tidak adanya dukungan dari pihak terkait, seperti pemerintah dan perusahaan perkebunan swasta yang berada di sekitarnya menyebabkan petani menjalankan usahatannya asal-asalan, cenderung usahatannya beroperasi tanpa ijin, dan kebun kebun mereka berada pada lahan yang secara hukum tidak diperbolehkan untuk budidaya kelapa sawit (Schoneveld, dkk., 2018).

Hambatan pemasaran hasil

Petani kelapa sawit swadaya masih banyak mengalami hambatan dalam proses pemasaran TBS. Sistem tata niaga TBS kelapa sawit yang berasal dari petani swadaya bervariasi, masing-masing rantai tata niaga akan mempengaruhi harga jual yang diterima oleh petani. Semakin panjang rantai tata niaga, akan semakin kecil penerimaan yang diterima oleh petani (Harahap dkk., 2017). Para petani tidak mengetahui informasi tentang harga TBS di pabrik, dan tidak mendapatkan akses untuk menjual TBS langsung ke pabrik. Selama ini belum ada kelembagaan yang memfasilitasi pemasaran TBS dari petani kelapa sawit swadaya ke pabrik. Petani hanya bisa menjual TBS ke pedagang pengumpul, harganya juga ditentukan oleh pedagang tersebut, dan karena kualitas hasilnya rendah maka harganya juga rendah.

Prasarana transportasi juga kurang memadai, kondisi jalan masih banyak yang rusak sehingga menghambat proses pengangkutan TBS, hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa margin pasar relatif tinggi. Petani terpaksa harus menerima kondisi ini agar bisa mendapatkan hasil yang sebagian besar digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Hambatan pembiayaan

Keterbatasan modal yang dimiliki oleh petani kelapa sawit swadaya juga menjadi hambatan dalam peningkatan produktivitas kebunnya. Skala usahatani kelapa sawit swadaya tergolong kecil, rata-rata luas lahan petani di bawah 1 ha, sehingga mengakibatkan pendapatannya rendah dan tidak cukup untuk investasi dan memenuhi kebutuhan biaya operasional kebun. Petani juga tidak memiliki akses terhadap sumber pembiayaan lain selain pendapatannya, bahkan sebagian besar petani tidak mengetahui informasi tentang sumber-sumber pembiayaan usahatani. Akses untuk mendapatkan pembiayaan dari luar juga tidak memungkinkan karena kebanyakan kebun belum memiliki legalitas secara hukum (Sulistyowati, dkk., 2019). Hal ini menjadi salah satu penyebab rendahnya motivasi mereka untuk menjalankan usahatani dan meningkatkan produktivitas kebunnya.

Hambatan kelembagaan

Kelembagaan dalam usahatani memiliki kemampuan untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan pelaku usahatani. Fakta di lapangan menyatakan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah dengan kelembagaan yang dibutuhkan oleh pelaku usahatani (Prabawanti dan Herman, 2019).

Peran kelembagaan belum dirasakan oleh petani kelapa sawit swadaya, dan hal ini dapat dianggap sebagai salah satu hambatan dalam peningkatan produktivitas kebun. Selama ini belum ada lembaga yang menaungi petani kelapa sawit swadaya, baik berupa kelompok tani ataupun lembaga-lembaga lain yang dapat memberikan informasi,

bimbingan, dan bantuan teknis tentang usahatani kelapa sawit termasuk pembiayaannya. Berdasarkan hasil wawancara, petani sangat menginginkan adanya kelembagaan yang dapat memayungi usahatannya, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan bagaimana mengelola usahatannya sesuai dengan "*good agricultural practice*". Pernyataan dari petani ini menunjukkan bahwa semangat untuk menjalankan usahatannya cukup baik, sehingga perlu menjadi perhatian instansi terkait baik pemerintah ataupun swasta untuk segera mewujudkan keinginan tersebut.

Rekomendasi Kebijakan

Hambatan dalam peningkatan produktivitas kelapa sawit swadaya di Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya harus segera diatasi agar taraf hidup dan kesejahteraan petani meningkat. Pemerintah sebagai penentu arah kebijakan pembangunan, secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab terhadap keberadaan perkebunan rakyat, sehingga dukungan dan pengaturan dari pemerintah terhadap perkebunan rakyat sangat diperlukan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui regulasi yang harus berpihak kepada petani. Pemerintah berdasarkan kearifan lokal dan spesifik wilayah perlu membuat pedoman *good agriculture practice* khusus untuk petani kelapa sawit swadaya, agar tata kelola perkebunan kelapa sawit rakyat memperhatikan aspek keberlanjutan.

Pihak terkait lainnya, seperti perusahaan perkebunan yang berada dekat dengan lokasi perkebunan rakyat juga seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap keberadaan petani swadaya. Dukungan dan bantuan yang diberikan

pada petani dapat berupa bantuan input, bimbingan teknis, dan pendampingan agar peningkatan produktivitas pada kebun kelapa sawit swadaya dapat tercapai.

Hambatan pemasaran TBS dapat diatasi dengan membangun peran kelembagaan dalam pemasaran agar efisien, misalnya dengan membentuk kelompok tani atau koperasi. Peran kelembagaan dapat diinisiasi oleh pemerintah daerah setempat atau pihak lain yang terkait dengan kepentingan petani melalui bantuan operasional kemudahan perizinan. Harga yang terlalu rendah di tingkat petani bisa diatasi dengan membangun sinergi dan kondisi saling membutuhkan antara petani dan pabrik kelapa sawit, misalnya dengan menetapkan regulasi tentang tata niaga TBS yang dapat mewadahi kepentingan petani dan pabrik kelapa sawit. Prasarana transportasi bisa dibenahi dengan cara pemerintah daerah dan perusahaan perkebunan swasta yang berada di lokasi tersebut bersinergi untuk membangun, memelihara dan memperbaiki prasarana transportasi. Peningkatan kualitas jalan diharapkan dapat membuat pemasaran TBS menjadi lebih efisien dan menguntungkan petani, sehingga petani dapat lebih termotivasi untuk berupaya meningkatkan produktivitas kebunnya.

Keterbatasan petani terhadap akses sumber pembiayaan dapat diatasi melalui pola kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk membantu petani dalam mengakses sumber pembiayaan. Pemerintah atau lembaga lainnya perlu menciptakan suatu skema penyediaan modal bagi petani secara berkelanjutan, melakukan sosialisasi tentang pentingnya investasi dalam pengembangan usaha, dan memberikan pendampingan pada petani dalam proses

pembiayaan. Peningkatan peran lembaga keuangan ini diharapkan dapat membantu petani swadaya dalam meningkatkan produktivitas kebunnya, sehingga dapat mewujudkan petani swadaya yang sejahtera.

Berbagai rekomendasi untuk mengatasi hambatan teknologi dan informasi, pemasaran hasil, dan pembiayaan pertanian yang telah dipaparkan di atas akan berimplikasi pada peningkatan peran kelembagaan yang selama ini memang kurang dirasakan oleh petani kelapa sawit swadaya di Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya. Inventarisasi dan analisis hambatan peningkatan produktivitas kelapa sawit swadaya ini diharapkan dapat menjadi basis data untuk pemerintah maupun pihak terkait, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat regulasi atau kebijakan-kebijakan yang memayungi dan memfasilitasi petani kelapa sawit swadaya, agar dapat meningkatkan produktivitasnya dan menjalankan usahatannya secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berbagai hambatan yang dialami oleh petani kelapa sawit swadaya di Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya adalah:

1. Keterbatasan petani dalam mendapatkan informasi dan teknologi tentang budidaya yang baik dan benar.
2. Petani tidak mengetahui informasi tentang harga TBS dan tidak memiliki akses untuk menjual TBS langsung ke pabrik.
3. Petani tidak memiliki akses terhadap sumber pembiayaan lain selain pendapatannya.
4. Belum ada lembaga yang menaungi petani kelapa sawit swadaya.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kubu Raya. 2020. *Kabupaten Kubu Raya dalam Angka*. BPS Kabupaten Kubu Raya.
- Darwis, K. 2017. Ilmu Usahatani; Teori dan Terapan. CV. Inti Mediatama. Makasar.
- Dinas Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan Kab. Kubu Raya, 2018.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2019. *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2018*. BPS – Statistics Indonesia. Jakarta.
- Harahap, G., E.S. Simanullang, M. Romadon, 2017. Analisis Efisiensi Tataniaga Tandan Buah Segar (Tbs) Kelapa Sawit(Study Kasus : Petani Perkebunan Inti Rakyat Desa Meranti Paham Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu). *Wahana Inovasi*, 6(2): 170 – 180.
- Jelsma, I., G.C. Schoneveld, A. Zoomers, & A.C.M.van Westen. 2017. Unpacking Indonesia's Independent Oil Palm Smallholders: An Actor-disaggregated Approach to Identifying Environmental and Social Performance Challenges. *Land Use Policy*, 69: 281-297.
- Mara, A., Y. Fitri. 2013. Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat terhadap Pendapatan Wilayah Desa (PDRB) di Provinsi Jambi. *Agrisep*, 13(1), 101-110.
- PASPI. 2017. Peran Strategis Perkebunan Sawit Rakyat Indonesia. PASPI Monitor, 3(40):961-967.

- Prabawanti, B.E., S.Y.R.S. Herman. 2019. *Sukses Membangun Kewirausahaan Sosial; Kosep, Teori, dan Praktik.* Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Jakarta.
- Schoneveld, G.C., I. Jelsma, H. Komarudin, A. Andrianto, B. Okarda, dan D. Ekowati. 2018. Standar Publik dan Swasta untuk Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan: Hambatan Kepatuhan yang Dihadapi Petani Swadaya di Indonesia. *Info Brief No 212 Mei 2018:* 1-3.
- Soekartawi. 2016. *Agribisnis: Teori dan Aplikasinya.* Rajawali Press. Jakarta.
- Sulistyowati, H., Sarbino, N. Arifin. 2021. Studi Keragaan Kebun Kelapa Sawit Swadaya Mandiri di Kabupaten Kubu Raya. *Perkebunan dan Lahan Tropika, 11(1),* 9-14.